

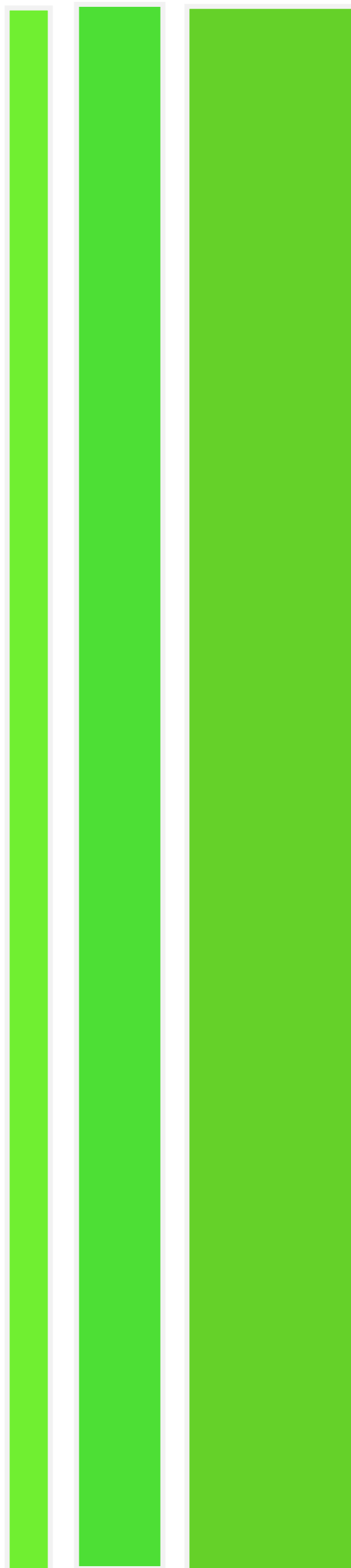
**PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL**

DINAS PERHUBUNGAN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

Jl Gatot Subroto Komplek Terminal Dukuhsalam





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Gatot Subroto komplek Terminal Dukuhsalam Slawi

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Kabupaten Tegal yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kab. Tegal mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Perhubungan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Slawi, 12 April 2022

Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Tegal


Drs. AKHMADUWES QORONI, MT
NIP. 19740621 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Gatot Subroto komplek Terminal Dukuhsalam Slawi

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagai mana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun, berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Slawi, 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tegal


Dis. AKHMAD UWES QORONI, MT
NIP. 19740621 199302 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Daerah pada TA 2021 adalah sebesar Rp. 1.995.902.025,- atau mencapai 96,90% (persen) dari anggaran Pendapatan-LRA sebesar Rp. 2.059.828.000,-.

Realisasi Belanja Daerah pada TA 2021 adalah sebesar Rp. 27.562.576.670,- atau mencapai 87,89% (persen) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 31.360.318.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 69.225.053.719,20,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 485.038.812,50,- Aset Tetap sebesar Rp. 68.712.227.048,- dan Aset Lainnya Rp. 27.787.858,75,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 73.368.930,- dan Rp. 69.151.951.789,25,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 2.021.180.300,- terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebesar Rp. 2.021.180.300,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 21.555.015.443,25,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (19.533.835.143,25,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp 56.785.429.632,25,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. . (19.533.835.143,25,-) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp. 69.151.951.789,25,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DINAS PERHUBUNGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
PENDAPATAN	2.059.828.000,00	1.995.902.025,00	96,90	2.042.958.135,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.059.828.000,00	1.995.902.025,00	96,90	2.042.958.135,00
-Pendapatan Retribusi Daerah	2.059.828.000,00	1.995.902.025,00	96,90	2.041.958.135,00
-Lain-lain PAD Yang Sah	00,00	0,00	0,00	1.000.000
BELANJA	31.360.318.000,00	27.562.576.670,00	87,89	26.656.954.902,00
BELANJA OPERASI	14.694.083.850,00	14.138.457.986,00	96,22	21.178.886.995,00
-Belanja Pegawai	3.837.474.575,00	3.640.152.435,00	94,86	9.184.805.176,00
-Belanja Barang dan Jasa	10.856.609.275,00	10.498.305.551,00	96,70	11.994.081.819,00
BELANJA MODAL	16.666.234.150,00	13.424.118.684,00	80,55	5.478.067.907,00
-Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.898.819.350,00	1.862.187.355,00	98,07	133.794.300,00
-Belanja Modal Gedung dan Bangunan	204.914.800,00	204.050.000,00	99,58	1.511.334.474,00
-Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.562.500.000,00	11.357.881.329,00	77,99	3.832.939.133,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(29.300.490.000,00)	(25.566.674.645,00)	87,26	(24.613.996.767,00)
SILPA	(29.300.490.000,00)	(25.566.674.645,00)	87,26	(24.613.996.767,00)

II. NERACA

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NERACA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (Dalam Rupiah)

URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	50.000,00	267.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	732.519.194,00	767.240.919,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.179.506,00	1.179.506,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(718.782.532,50)	(648.655.355,00)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	470.072.645,00	4.387.378.845,00
JUMLAH ASET LANCAR	485.038.812,50	4.507.410.915,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	2.659.060.000,00	2.659.060.000,00
Peralatan dan Mesin	22.545.063.234,00	20.750.241.579,00
Gedung dan Bangunan	46.851.285.593,00	46.636.201.803,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.970.558.755,00	14.612.677.426,00
Aset Tetap Lainnya	340.395.000,00	340.395.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(29.654.135.534,00)	(26.314.022.770,00)
JUMLAH ASET TETAP	68.712.227.048,00	58.684.553.038,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00

URAIAN	2021	2020
Aset Tidak Berwujud	84.201.435,00	84.201.435,00
Aset Lain-lain	3.082.020.000,00	3.082.020.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(56.413.576,25)	(35.363.217,50)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.082.020.000,00)	(3.082.020.000,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	27.787.858,75	48.838.217,50
JUMLAH ASET	69.225.053.719,25	63.240.802.170,50
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	60.000.000,00	120.000.000,00
Utang Belanja	13.368.930,00	11.072.834,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	73.368.930,00	131.072.834,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	73.368.930,00	131.072.834,00
EKUITAS		
EKUITAS	69.151.951.789,25	63.109.729.336,50
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	69.225.320.719,25	63.240.802.170,50

III. LAPORAN OPERASIONAL

DINAS PERHUBUNGAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN – LO	2.021.180.300,00	2.280.270.255,00	(259.089.955,00)	(11,36)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	2.021.180.300,00	2.213.415.603,00	(192.235.303,00)	(8,69)
Pajak Daerah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah – LO	2.021.180.300,00	2.213.415.603,00	192.235.303,00	(8,69)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Transfer Khusus – DAK Fisik – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Transfer Umum – DAU – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Transfer Umum – DBH – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Pemerintah – Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	0,00	66.854.652,00	(66.854.652,00)	(100,00)
Pendapatan Hibah – LO	0,00	66.854.652,00	(66.854.652,00)	(100,00)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN	21.555.015.443,25	20.645.749.320,75	909.266.122,50	4,40
BEBAN OPERASI	21.555.015.443,25	20.645.749.320,75	909.266.122,50	4,40
Beban Pegawai	3.640.152.435,00	9.184.805.176,00	(5.544.652.741,00)	(60,37)
Beban Persediaan	4.381.057.838,00	6.234.996.010,00	(1.853.938.172,00)	(29,73)
Beban Jasa	5.491.950.336,00	605.493.411,00	4.886.456.925,00	807,02
Beban Pemeliharaan	3.945.589.340,00	906.885.572,00	3.038.703.768,00	335,07
Beban Perjalanan Dinas	638.676.033,00	111.253.303,00	527.422.730,00	474,07
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	154.000.000,00	(154.000.000,00)	(100,00)
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	65.308.997,50	119.765.070,00	(54.456.072,50)	(45,47)
Beban Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.392.280.463,75	3.328.550.778,75	63.729.685,00	1,91
Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(19.533.835.143,25)	(18.365.479.065,75)	(1.168.356.077,50)	6,36
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(19.533.835.143,25)	(18.365.479.065,75)	(1.168.356.077,50)	6,36

URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
POS LUAR BIASA				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT - LO	(19.533.835.143,25)	(18.365.479.065,75)	(1.168.356.077,50)	6,36

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	63.109.729.336,50	56.785.429.632,25
SURPLUS/DEFISIT – LO	(19.533.835.143,25)	(18.365.479.065,75)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	9.332.951,00	75.515.003,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	25.566.724.645,00	24.614.263.767,00
EKUITAS AKHIR	69.151.951.789,25	63.109.729.336,50

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.2. Basis Akuntansi

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal menerapkan Basis Akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.3. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai

wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.4. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah.
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut

atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas

piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya

dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan Tahun 2016.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 PENDAPATAN DAERAH

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kab.Tegal adalah sebagai berikut:

Akun	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	5=3/2	6
a. Pendapatan Retribusi Daerah	2.059.828.000,-	1.995.902.025,-	96,90	2.041.958.135,-
b. Lain-lain PAD yang Sah	0,-	0,-	0	1.000.000,-
Jumlah	2.059.828.000,-	1.995.902.025,-	96,90	2.042.958.135,-

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 1.995.902.025,- atau 96,90% dari anggarannya sebesar Rp. 2.059.828.000,- dan turun sebesar Rp. 47.056.110,- dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp. 2.042.958.135,-. Pendapatan Daerah terdiri atas :

a) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan daerah dari retribusi daerah TA 2021 Rp. 2.059.828.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.995.902.025,- atau 96,90 %, dan turun sebesar Rp. 47.056.110,- dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp. 2.042.958.135,-. Pendapatan Daerah terdiri atas :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	2.059.828.000,-	1.995.902.025,-
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	664.500.000,-	579.614.000,-
Retribusi PKB – LRA	1.129.200.000,-	1.076.850.000,-
Retribusi Pengolahan Limbah Cair – LRA	25.800.000,-	28.400.000,-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	116.715.000,-	187.247.252,-
Retribusi Terminal – LRA	52.265.000,-	56.862.500,-
Retribusi Tempat Khusus Parkir – LRA	71.348.000,-	66.928.000,-

B.2 BELANJA DAERAH

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tegal TA 2021 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab.Tegal adalah sebagai berikut :

No.	AKUN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1.	Belanja Pegawai	3.837.474.575,-	3.640.152.435,-	94,86	9.184.805.176,-
2.	Belanja Barang	10.856.609.275,-	10.498.305.551,-	96,70	11.994.081.819,-

3.	Belanja Modal	16.666.234.150,-	13.424.118.684,-	80,55	5.478.067.907,-
	JUMLAH	31.360.318.000,-	27.562.576.670,-	87,89	26.656.954.902,-

Realisasi Belanja Daerah TA 2021 sebesar Rp. **27.562.576.670,-** atau 87,89 % dari anggarannya sebesar Rp. **31.360.318.000,-** naik sebesar Rp. 905.621.768,- dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp. **26.656.954.902,-**.

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp. 3.640.152.435,- atau 94,86% dari anggarannya sebesar Rp. 3.837.474.575,-. Realisasi TA 2021 turun sebesar Rp. 5.544.652.741,- dibandingkan dengan realisasi TA. 2020 sebesar Rp.98.184.805.176,- yang terdiri dari :

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
Gaji dan tunjangan PNS	3.537.314.675	3.402.896.431	96,20%	3.502.958.967,-
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	117.315.000	77.796.004	66,31%	62.046.209,-
Belanja Uang Lembur	-	-	-	76.685.000,-
Honorarium PNS	182.844.900	159.460.000	87,21%	397.545.000,-
Honorarium Non PNS	-	-	-	5.145.570.000,-
JUMLAH	3.837.474.575	3.640.152.435	94,86%	9.184.805.176,-

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2021 sebesar Rp. 10.498.305.551,- atau 96,70 % dari anggaran sebesar Rp. 10.856.609.275,- turun sebesar Rp. 1.495.776.268,- dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp. 11.994.081.819,-.

c) Belanja Modal

Realisasi belanja modal TA 2021 sebesar Rp. 13.424.118.684,- atau 80,55 % dari anggaran sebesar Rp. 16.666.234.150,- naik sebesar Rp. 7.946.050.777,- dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp. 5.478.067.907,- yang terdiri dari:

NO.	AKUN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1.	Peralatan dan Mesin	1.898.819.350,-	1.862.187.355,-	98,07	133.794.300,-
2.	Gedung dan bangunan	204.914.800,-	204.050.000,-	99,58	1.511.334.474,-
3.	Jalan, Irigasi dan jaringan	14.562.500.000,-	11.357.881.329,-	77,99	3.832.939.133,-
	JUMLAH	16.666.234.150,-	13.424.118.684,-	80,55	5.478.067.907,-

d) SURPLUS (DEFISIT)

Surplus (Defisit) merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah APBD Pemerintah Kabupaten Tegal TA 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kab.Tegal sebesar Rp. 25.566.674.645,- dari yang dianggarkan defisit sebesar Rp. 29.300.490.000,-.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET

a) Aset Lancar

1. Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2021 <hr/> Rp. 0 ,00	31 Desember 2021 <hr/> Rp.0,00
--	---	---

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan Kab.Tegal yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 yang belum disetor ke rekening kas daerah. Kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00

2. Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2021 <hr/> Rp. 50.000,00	31 Desember 2020 <hr/> Rp. 267.000,00
---------------------------------------	---	--

Kas di bendahara penerimaan Dinas Perhubungan Kab.Tegal merupakan uang yang masih ada pada bendahara penerimaan dan belum disetorkan ke rekening kas daerah sampai dengan 31 Desember 2021. Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 50.000,-.

c. Piutang	31 Desember 2021 <hr/> Rp. 732.519.194,00	31 Desember 2020 <hr/> Rp. 768.420.425,00
-------------------	--	--

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang Dinas Perhubungan Tahun 2021 sebesar Rp. 732.519.194,- terdiri dari Piutang retribusi pengolahan limbah cair Th. 2019, 2020 dan Th. 2021 sebesar Rp. 4.800.000,-. Piutang retribusi tempat khusus parkir Th. 2021 sebesar Rp. 4.000.000,-. Piutang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Th. 2018, 2020 dan Th. 2021 sebesar Rp. 478.425.000,-, dan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah Th. 2019, 2020 dan Th. 2021 sebesar Rp. 245.294.194,-.

d. Penyisihan Piutang	31 Desember 2021 <hr/> Rp. (718.782.532,50)	31 Desember 2020 <hr/> Rp. (648.655.355,00)
------------------------------	--	--

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Penyisihan piutang per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. (718.782.532,50)**.

d. Persediaan	31 Desember 2021 <hr/> Rp. 470.072.645,00	31 Desember 2020 <hr/> Rp. 4.387.378.845,00
----------------------	--	--

Persediaan merupakan barang yang dapat dijual (dalam rangka memberikan pelayanan) atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Persediaan, antara lain dapat berupa persediaan Alat tulis kantor, bahan cetak, bahan computer, alat listrik, alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, dan komponen rambu-rambu. Persediaan per 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp. 470.072.645,- sedangkan persediaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 4.387.378.845,-. Persediaan terdiri dari :

PERSEDIAAN	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Barang Bahan Habis Pakai ATK	2.603.755	5.000.270
Barang ATK Sarana Teknologi Informasi	1.749.000	-
Barang Karcis	37.403.520	44.290.840
Barang Cetakan Keperluan Kantor	3.489.860	7.280.020
Barang Kartu Uji & Tanda Uji	200.875.000	349.389.500
Barang Traffic Cone, Water Barrier & Rambu Portable	120.889.560	173.480.230
Barang LPJU	-	3.444.732.500
Barang Suku Cadang & Peralatan Pendukung Perbaikan PJU	99.957.950	-
Barang Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.098.700	148.600
Barang Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.005.300	1.710.900
Jumlah Persediaan	470.072.645	4.026.032.860

2. Aset Tetap

31 Desember 2021
Rp. 68.712.227.048,00

31 Desember 2020
Rp. 58.684.553.038,00

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemkab Tegal, yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kab.Tegal atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi SKPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemkab Tegal melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal, dan penilaian atas aset tetap yang telah dikuasai namun belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap berasal dari hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan penghapusan aset tetap. Berikut adalah saldo aset tetap yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kab.Tegal per tanggal 31 Desember 2020 dan 2021 :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)
a. Tanah	2.659.060.000,00	-	-	2.659.060.000,00
b. Peralatan dan Mesin	22.545.063.234,00	1.794.821.655,00	-	20.750.241.579,00
c. Gedung dan bangunan	46.851.285.593,00	215.083.790,00	-	46.636.201.803,00
d. Jalan, Jaringan, & Irigasi	25.970.558.755,00	11.357.881.329,00	-	14.612.677.426,00
e. Aset Tetap Lainnya	340.395.000,00	-	-	340.395.000,00
f. Akumulasi Penyusutan	(29.654.135.534,00)	(3.340.112.764,00)	-	(26.314.022.770,00)
Jumlah Aset Tetap	68.712.227.048,00	10.027.674.010,00	-	58.684.553.038,00

a. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.659.060.000,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2020.

b. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 22.545.063.234,00 bertambah sebesar Rp. 1.794.821.655,00 Dibanding dengan saldo tahun 2020 sebesar Rp. 20.750.241.579,00.

- c. Gedung dan Bangunan
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 46.851.285.593,00 meningkat sebesar Rp. 215.083.790,00 dibandingkan saldo TA 2020 sebesar Rp. 46.636.201.803,00.
- d. Jalan, Jaringan dan Irigasi
Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 25.970.558.755,00 bertambah sebesar Rp. 11.357.881.329,00 dari saldo per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp. 14.612.677.426,00.
- e. Aset Tetap Lainnya
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 340.395.000,- tidak terdapat penambahan ataupun pengurangan dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 340.395.000,00
- f. Akumulasi Penyusutan
Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. (29.654.135.534,00) sedangkan tahun 2020 adalah sebesar Rp. (26.314.022.770,00).

3. Aset Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp. 27.787.858,75	Rp. 48.838.217,50
a. Aset Tidak Berwujud		
Aset tidak berwujud pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 84.201.435,00.		
b. Aset Lain-Lain		
Aset lain lain merupakan aset yang rusak berat dan akan dihapus. Saldo Aset lain lain per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 3.082.020.000,00.		
c. Akumulasi Penyusutan Aset Lain- Lain		
Akumulasi penyusutan aset lain lain sebesar Rp (3.082.020.000,00).		
d. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah (56.413.576,25).		

II. KEWAJIBAN

1. KEWAJIBAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp. 73.368.930,00	Rp. 131.072.834,00

Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban di tahun 2021 adalah sebesar Rp. 73.368.930,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pendapatan Diterima dimuka
Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 60.000.000,- yang diperoleh dari retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa ruko untuk indomaret di

terminal adiwerna) selama 5 tahun sebesar Rp 300.000.000,- yang telah berjalan selama empat (4) tahun sehingga berkurang sebesar Rp. 240.000.000,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari retribusi Pemakaian kekayaan daerah (sewa tanah dan bangunan) yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

b) Utang Belanja

Nilai Utang Belanja kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 adalah Rp. 13.368.930,- dan 2020 adalah sebesar Rp. 11.072.834,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Belanja per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

URAIAN	2021	2020
Utang Belanja Jasa Kantor-Beban Telepon	0.-	0.-
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	458.500,-	296.000,-
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	8.854.010,-	8.754.441,-
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.056.420,-	2.022.393,-
JUMLAH	13.368.930,-	11.072.834,-

III. EKUITAS DANA

1. Ekuitas Dana	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	<u>Rp. 69.151.951.789,25</u>	<u>Rp. 63.109.729.336,50</u>

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban. Ekuitas TA. 2021 sebesar Rp. 69.151.951.789,25,- naik sebesar Rp. 6.042.222.452,75,- dibandingkan TA 2020 sebesar Rp. 63.109.729.336,50,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 2.021.180.300,- dan Rp 2.280.270.255,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Pendapatan Retribusi Daerah-LO merupakan Pendapatan yang diperoleh dari Retribusi Pelayanan parkir tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengolahan limbah cair, Retribusi Pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir.

2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.640.152.435,- dan Rp. 9.184.805.176,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa pada Tahun 2021 adalah Rp. 5.491.950.446,-, Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 adalah Rp. 8.267.824.281,-. Beban barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

4. Beban Hibah

Jumlah beban hibah tahun 2021 adalah Rp.0,- sedangkan th. 2020 adalah sebesar Rp. 154.000.000,-

5. Beban Penyusutan

Jumlah Beban Penyusutan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.392.280.463,75 dan Rp. 3.328.550.778,75. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

6. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah Rp.65.308.997,50,- dan Rp. 119.765.070,00 .

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 56.834.094.632,25 Rp. 37.217.534.682,50

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 18.762.712.550,75 Rp. (28.934.843.762,25) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 62.761.160.851,50 dan Rp. 56.834.094.632,25,-.

F. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

F.1. Gambaran Umum

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Tegal Urusan Wajib Perhubungan merupakan urusan yang berkaitan dengan memindahkan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Urusan perhubungan selalu berkaitan dengan transportasi dan memiliki fungsi sebagai sektor penunjang pembangunan serta pemberi jasa bagi perkembangan ekonomi, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jasa perhubungan merupakan input dari kegiatan produksi, perdagangan, pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya. Pentingnya urusan ini tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas manusia serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air bahkan dari dan ke luar negeri.

Dinas Perhubungan kabupaten Tegal mempunyai personil sejumlah 55 orang PNS, 1 orang PTT, 244 orang PHL.

F.2 Struktur Organisasi Tahun 2021

Struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal antara lain:

- Kepala Dinas : Drs. AKHMAD UWES QORONI. MT
- Sekretaris : Dra. SITI FAZILAH, MM
- Plt. Kepala Bidang MRLL & Perparkiran : MUHAJIR, S.IP
- Kepala Bidang Angkutan & Teknik Sarana : SUWONDO, S.IP
- Kepala Bidang Prasarana & Perlengkapan Jalan : SUPRAPTO, SE.M.Si
- Kepala Sub Bagian Perencanaan & Keuangan : DYAH INTAN PRIHARTIWI, S.E., MM
- Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian : Dra. ENDANG MARHAENI

- Kasi Lalu Lintas : WANGINING MELATI, S.E
- Kasi Perparkiran : BAYU ATMOWIYANTO, S.S.T(TD)., M.M.
- Kasi Angkutan & Terminal : AGIL SUPRAYOGI, S.ST., MT
- Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor : MOHAMAD KHALIMI, S.H
- Kasi Prasarana Jalan : MUHAJIR, S.IP
- Kasi Perlengkapan Jalan : DIDI HENDRATNO, S.IP